



**EVALUASI RENJA
TAHUN 2022 TRIWULAN IV**



**PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas Rahmat dan Karunia-Nya sehingga Evaluasi RENJA Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung Tahun 2022 Triwulan IV dapat terselesaikan.

Evaluasi RENJA 2022 Triwulan IV ini memuat evaluasi Program dan Kegiatan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung sepanjang tahun 2022 sampai dengan Triwulan IV serta analisis pencapaian akuntabilitas kinerja terhadap indikator sasaran dan kegiatan yang telah ditetapkan pada Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung Periode 2019 - 2024.

Kami harap evaluasi RENJA ini dapat memberi manfaat dan gambaran perkembangan pembangunan sektor Koperasi dan UMKM di Provinsi Lampung yang diharapkan bisa dijadikan salah satu pedoman dalam pengambilan keputusan pembangunan di tahun-tahun berikutnya. Kami menyadari laporan ini masih belum sempurna, masukan dan koreksi terhadap laporan ini sangat diharapkan guna perbaikan-perbaikan diwaktu yang akan datang.

Demikian laporan Evaluasi RENJA Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung tahun 2022 Triwulan IV ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Bandar Lampung, Januari 2023

KEPALA DINAS KOPERASI DAN
UKM PROVINSI LAMPUNG,



Drs. SAMSURIAL., MM.

PEMBINA UTAMA MADYA

NIP. 19670418 199203 1 003

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Maksud dan Tujuan	1
1.3 Indikator Sasaran	2
II. PERSANDINGAN PROGRAM DAN KEGIATAN RENJA DENGAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH	4
2.1 Kesesuaian Program, Kegiatan, Pagu Pendanaan, Indikator dan Target Kinerja Antara Dokumen Renja dengan DPA Perangkat Daerah	4
2.2 Kesesuaian Program/Kegiatan/Subkegiatan Antara RENJA Perangkat Daerah Dengan APBD Tahun 2022.....	15
2.3 Kesesuaian Program, Kegiatan, Pagu Pendanaan, Indikator dan Target Kinerja Antara Dokumen Renja dengan Renstra Perangkat daerah	17
III. CAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH.....	19
3.1 Realisasi Capaian Indikator Kinerja Utama Kepala Perangkat Daerah Triwulan IV (Semester II).....	19
3.2 Realisasi Capaian Kinerja Program/Kegiatan /Subkegiatan dan Anggaran Rencana Kerja Perangkat Daerah Triwulan IV Tahun 2022	19
IV. HAMBATAN DAN KENDALA	31
4.1 Hambatan dan kendala	31
4.2 Upaya Pemecahan Masalah	31
V. PENUTUP	32
5.1 Simpulan	32
5.2 Rekomendasi.....	32
LAMPIRAN	

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bahwa Pemerintah Daerah wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) yang merupakan program pembangunan 20 (dua puluh) tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) yang merupakan program pembangunan 5 (lima) tahunan dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai pedoman pembangunan tahunan.

Sebagaimana amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah. Oleh karena itu Renja Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung tahun 2022 juga harus dilakukan evaluasi.

Evaluasi Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022 merupakan evaluasi dari Renja yang telah disusun dan dilaksanakan pada tahun 2022 sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung Tahun 2019 – 2024.

1.2 Maksud dan Tujuan

Sesuai dengan Permendagri Nomor Nomor 86 Tahun 2017 tujuan dari evaluasi dokumen perencanaan ini adalah untuk mewujudkan hal sebagai berikut :

- a. Konsistensi antara kebijakan dengan pelaksanaan dan hasil rencana pembangunan daerah;
- b. Konsistensi antara RPJPD dengan RPJPN dan RTRW nasional;
- c. Konsistensi antara RPJMD dengan RPJPD dan RTRW daerah;

- d. Konsistensi antara RKPD dengan RPJMD; dan
- e. Kesesuaian antara capaian pembangunan daerah dengan indikator-indikator kinerja yang telah ditetapkan.

Berikut ini adalah maksud dan tujuan dari evaluasi Renja Tahun 2022 Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung :

1.3.1 Maksud

Maksud Evaluasi Renja Tahun 2022 Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung adalah untuk mengevaluasi hasil Renja yang menjadi acuan pelaksanaan tugas dan fungsi setiap unit kerja yang diemban oleh seluruh aparatur dilingkup Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung yang dilaksanakan secara koordinatif dan terpadu dengan instansi terkait, lembaga swadaya masyarakat, kalangan dunia usaha, dan masyarakat agar terwujud keberhasilan pelaksanaan secara sinergi program kegiatan yang dibiayai oleh dana APBD Provinsi Lampung.

1.3.2 Tujuan

Tujuan dari Evaluasi Renja Tahun 2022 ini adalah untuk melihat tingkat capaian dari realisasi Renja dalam rangka mengukur keberhasilan pencapaian kinerja di Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung dalam rentan waktu satu tahun dengan melihat keselarasan dan proposionalitas dalam menjabarkan Renstra sekaligus merefleksikan kinerja yang sesuai dengan perencanaan anggaran.

1.3 Indikator Sasaran

Sesuai dengan RENSTRA Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Lampung Periode 2019-2024, ada 1 (satu) tujuan yang akan di capai oleh Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung yaitu **“Meningkatnya Daya Saing Koperasi dan UMKM untuk mendukung pertumbuhan ekonomi”**

Sedangkan Sasaran Utama Strategis Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung yang akan di lakukan pada tahun 2022 yaitu:

1. Meningkatnya Koperasi Yang Berkualitas
2. Meningkatnya Usaha Kecil Yang Menjadi Wirausaha

Selengkapnya indikator kinerja dan target sasaran sebagaimana dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 1.3.1. Indikator Kinerja dan Target Sasaran Tahun 2022

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET TAHUN 2022
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Daya Saing Koperasi dan UMKM untuk mendukung pertumbuhan ekonomi	1. Meningkatkan Koperasi Yang Berkualitas	1 Persentase Koperasi Yang Berkualitas	34,26
		1. Meningkatkan Usaha Kecil Yang Menjadi Wirausaha	1 Persentase Usaha Kecil Yang Menjadi Wirausaha (Akumulasi)	3,29

Untuk mencapai sasaran tersebut dilaksanakan 1 (satu) program penunjang dan 7 (tujuh) program utama yang bersumber dari APBD yaitu:

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
- 2) Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam
- 3) Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi
- 4) Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi
- 5) Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian
- 6) Program Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi
- 7) Program Pemberdayaan Usaha Menengah Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)
- 8) Program Pengembangan UMKM

II. PERSANDINGAN PROGRAM DAN KEGIATAN PADA RENJA DENGAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

2.1 Kesesuaian Program, Kegiatan, Pagu Pendanaan, Indikator dan Target Kinerja Antara Dokumen Renja dengan DPA Perangkat Daerah

Untuk menunjang pelaksanaan Tupoksi, Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2022 mendapat alokasi anggaran sejumlah total **Rp. 19.110.921.000,-** (*Sembilan belas milyar seratus sepuluh juta sembilan ratus dua puluh satu ribu rupiah*) sedangkan target PAD yang dibebankan kepada Dinas Koperasi dan UKM Provinsi sebesar **Rp. 177.140.250,-** (*Seratus tujuh puluh tujuh juta seratus empat puluh ribu dua ratus lima puluh rupiah*) yang berasal dari UPTD Balaikop. Penyusunan perencanaan dan penganggaran Tahun 2022 ini berdasarkan **Kepmendagri nomor 050-3708 Tahun 2020** tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran, Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan dengan anggaran tersebut diatas direncanakan akan digunakan untuk menjalankan 8 (delapan) program dan 14 (empat belas) kegiatan serta 29 (dua puluh sembilan) sub kegiatan. Berikut ini adalah tabel belanja operasi dan target PAD Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung T.A. 2022 :

Tabel 2.1.1. Belanja Operasi Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung pada APBD Murni T.A 2022

NO	BELANJA	PAGU (Rp)	KET
1.	Belanja pegawai	10.535.488.908,38	Gaji dan Tunjangan
2.	Belanja barang dan jasa	8.260.765.691,62	Termasuk DAK non Fisik sebesar Rp. 2.419.964.000,-
3.	Belanja hibah	276.866.400,00	Rp. 90 juta hibah akta koperasi, Rp. 186.866.400 hibah umkm
4.	Belanja modal	37.800.000,00	
	TOTAL PAGU	19.110.921.000,00	

Pada APBD-Perubahan Tahun 2022, Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung mendapatkan penambahan pagu belanja sebesar **Rp. 762.706.133,55** (*Tujuh ratus enam puluh dua juta tujuh ratus enam ribu seratus tiga puluh tiga koma lima puluh lima rupiah*) dari pagu sebelumnya yaitu **Rp. 19.110.921.000,-** (*Sembilan belas milyar seratus sepuluh juta sembilan ratus dua puluh satu ribu rupiah*) sehingga

total pagu anggaran belanja pada APBD-Perubahan Tahun 2022 menjadi **Rp. 19.873.627.133,55** (*sembilan belas milyar delapan ratus tujuh puluh tiga juta enam ratus dua puluh tujuh seratus tiga puluh tiga koma lima puluh lima rupiah*) yang akan digunakan untuk melaksanakan 8 (*delapan*) program dan 14 (*empat belas*) kegiatan dan 29 (*dua puluh sembilan*) sub kegiatan. Untuk target penerimaan PAD yang dibebankan kepada Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung pada APBD Perubahan Tahun 2022 tidak mengalami perubahan dari target sebelumnya yaitu sebesar **Rp. 177.140.250,-**. Berikut ini adalah rincian target perubahan penerimaan PAD pada Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung. Berikut ini adalah rekapitulasi belanja dan target penerimaan pada APBD-P Tahun Anggaran 2022.

Tabel 2.1.2. Belanja Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung pada APBD Perubahan T.A 2022

NO	BELANJA	PAGU APBD SEBELUM PERUBAHAN (MURNI) (Rp.)	PAGU APBD SETELAH PERUBAHAN (Rp.)	SELISIH (Rp.)	KET
1.	Belanja pegawai	10.535.488.908,38	9.722.046.241,93	(813.442.666,45)	Pengurangan gaji dan tunjangan
2.	Belanja barang dan jasa	8.260.765.691,62	9.643.704.491,62	1.382.938.800,00	Termasuk DAK non Fisik Rp. 2.419.964.000,- SILPA DAK Rp. 48.705.800,-
3.	Belanja hibah	276.866.400,00	470.076.400,00	193.210.000,00	Penambahan Bantuan UMKM
4.	Belanja modal	37.800.000,00	37.800.000,00	0	
	TOTAL PAGU	19.110.921.000,00	19.873.627.133,55	762.706.133,55	

Tabel 2.1.3. Target Penerimaan PAD Pada APBD Perubahan Tahun 2022

NO	URAIAN PAD	TARGET TAHUN 2022 SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	TARGET TAHUN 2022 SETELAH PERUBAHAN (Rp)	SELISIH (Rp)	KET
1.	UPTD BADIKLATKOP	177.140.250,-	177.140.250,-	0	
	Jumlah	177.140.250,-	177.140.250,-	0	

Berikut ini adalah rekapitulasi perubahan pagu per Program pada APBD Perubahan Tahun 2022 (tabel 4) dan Sub Kegiatan yang mengalami perubahan (tabel 5).

Tabel 2.1.4. Rekapitulasi Penambahan/Pengurangan Pagu Per Program APBD Perubahan T.A 2022

NO	PROGRAM	PAGU APBD SEBELUM PERUBAHAN (Rp.)	PAGU APBD SETELAH PERUBAHAN (Rp.)	SELISIH (Rp.)	KET
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan	12,423,957,000.00	12,751,297,333.55	327,340,333.55	Pengurangan gaji dan tunjangan Rp.

NO	PROGRAM	PAGU APBD SEBELUM PERUBAHAN (Rp.)	PAGU APBD SETELAH PERUBAHAN (Rp.)	SELISIH (Rp.)	KET
	Daerah Provinsi				813.442.666,45
2.	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	511,500,000.00	511,500,000.00	0,00	Tidak ada pengurangan/penambahan
3.	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	150,000,000.00	150,000,000.00	0,00	Tidak ada pengurangan/penambahan
4.	Program Penilaian Kesehatan Ksp/Usp Koperasi	100,000,000.00	100,000,000.00	0,00	Tidak ada pengurangan/penambahan
5.	Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	2,836,784,000.00	2,885,489,800.00	48,705,800.00	Penambahan dari SILPA DAK
6.	Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	647,840,000.00	647,840,000.00	0,00	Tidak ada pengurangan/penambahan
7.	Program Pemberdayaan Usaha Menengah Usaha Kecil Dan Usaha Mikro (Umkm)	2,122,840,000.00	2,422,840,000.00	300,000,000.00	Penambahan untuk Bantuan untuk UMKM
8.	Program Pengembangan Umkm	318,000,000.00	404,660,000.00	86,660,000.00	Penambahan untuk kekurangan gaji konsultan PLUT dan pembinaan UMKM
	TOTAL	19,110,921,000.00	19,873,627,133.55	762,706,133.55	

Tabel 2.1.5. Rekapitulasi Sub Kegiatan Yang Terdapat Pengurangan / Penambahan Pagu Pada APBD Perubahan T.A 2022

SUB KEGIATAN	PAGU APBD MURNI (Rp)	PAGU SETELAH PERUBAHAN (Rp)	SELISIH	KET
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	105,819,000.00	54,800,000.00	(51,019,000.00)	Berkurang
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10,535,488,908.38	9,722,046,241.93	(813,442,666.45)	Pengurangan Gaji dan Tunjangan
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	13,121,091.62	13,936,456.62	815,365.00	Bertambah
Penyediaan Bahan Material	30,000,000.00	65,000,000.00	35,000,000.00	Bertambah
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	327,623,000.00	548,442,000.00	220,819,000.00	Bertambah
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	361,347,000.00	236,847,000.00	(124,500,000.00)	Berkurang
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	455,000,000.00	1,455,000,000.00	1,000,000,000.00	Bertambah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	75,000,000.00	95,000,000.00	20,000,000.00	Bertambah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	289,000,000.00	309,000,000.00	20,000,000.00	Bertambah
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10,000,000.00	29,667,635.00	19,667,635.00	Bertambah
Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	2,836,784,000.00	2,885,489,800.00	48,705,800.00	Penambahan dari SILPA DAK

SUB KEGIATAN	PAGU APBD MURNI (Rp)	PAGU SETELAH PERUBAHAN (Rp)	SELISIH	KET
Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja Pemerataan Pendapatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan	2,122,840,000.00	2,422,840,000.00	300,000,000.00	Penambahan dan operasional untuk Bantuan untuk UMKM
Produksi dan Pengolahan Pemasaran Sumber Daya Manusia serta Desain dan Teknologi	318,000,000.00	404,660,000.00	86,660,000.00	Penambahan untuk kekurangan gaji konsultan PLUT dan pembinaan UMKM
TOTAL			762,706,133.55	

Berikut ini adalah rincian program dan kegiatan anggaran Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung Tahun Anggaran Perubahan 2022:

➤ **Program Penunjang (1 program) terdiri dari :**

I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Rp. 12.751.297.333,55,- terdiri dari 6 kegiatan yaitu:

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Rp. 81.358.000,- Indikatornya adalah Persentase Keselarasan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan target 100 Persen. Sub kegiatannya adalah sebagai berikut :
 - a) Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Rp. 54.800.000,- indikatornya jumlah dokumen perencanaan sebanyak 12 dokumen
 - b) Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Rp. 26.558.000,- indikatornya jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah sebanyak 11 laporan
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Rp. 9.772.046.241,93,- Indikatornya adalah Persentase Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sebesar 100 persen. Sub kegiatannya adalah sebagai berikut :
 - a) Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Rp. 9.722.046.241,93,- indikatornya jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN sebanyak 75 orang/bulan
 - b) Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Rp. 10.000.000,- indikatornya Jumlah Dokumen

Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD sebanyak 36 dokumen

- c) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Rp. 10.000.000,- indikatornya Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD sebanyak 1 laporan
 - d) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Rp. 30.000.000,- indikatornya Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD sebanyak 17 laporan
3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Rp. 20.000.000,- Indikatornya adalah Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah dengan target 100 persen. Sub kegiatannya adalah sebagai berikut :
- a) Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Rp. 10.000.000,- indikatornya Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD sebanyak 1 laporan
 - b) Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Rp. 10.000.000,- indikatornya Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD sebanyak 1 laporan
4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Rp. 702.378.245,62,- Indikatornya adalah Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah sebanyak 100 persen. Sub kegiatannya adalah sebagai berikut :
- a) Sub Kegiatan Penyediaan Komponen instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Rp. 10.000.000,- indikatornya Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan sebanyak 12 paket
 - b) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Rp. 25.000.000,- indikatornya Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan sebanyak 12 paket

- c) Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Rp. 13.936.456,62,- indikatornya Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan sebanyak 12 paket
 - d) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Material Rp. 65.000000,- indikatornya Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan sebanyak 12 paket
 - e) Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu Rp. 40.000.000,- indikatornya Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu sebanyak 12 laporan
 - f) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Rp. 548.442.000,- indikatornya Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD sebanyak 12 laporan
5. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Rp. 1.691.847.000,- indikatornya adalah Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sebesar 100 persen. Sub kegiatannya adalah sebagai berikut :
- a) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Rp. 236.847.000,- indikatornya Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan sebanyak 12 laporan
 - b) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Rp. 1.455.000.000,- indikatornya Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan sebanyak 12 laporan
6. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Rp. 483.667.635,- indikatornya adalah Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sebesar 100 persen. Sub kegiatannya adalah sebagai berikut :
- a) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Rp. 95.000.000,- Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya sebanyak 1 unit
 - b) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Rp.

309.000.000,- Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya sebanyak 9 unit

- c) Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Rp. 29.667.635,- indikatornya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara sebanyak 12 unit
- d) Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Rp. 50.000.000,- indikatornya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi sebanyak 1 unit

➤ **Program Utama (7 Program) terdiri dari :**

II. Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam 511.500.000, terdiri dari 2 kegiatan dan 2 sub kegiatan yaitu :

1. Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Rp. 245.697.000,- indikator Persentase Kelompok/Koperasi Yang Diberi Penyuluhan Kelembagaan dan Izin Usaha Koperasi sebesar 100 persen dengan sub kegiatan yaitu :
 - a) Sub kegiatan Fasilitasi Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Rp. 245.697.000,- dengan indikator sub kegiatan yaitu Jumlah Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1(Satu) Daerah Provinsi yang Memiliki Usaha Simpan Pinjam sebanyak 11 unit usaha
2. Kegiatan Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Rp. 265.803.000,- indikator kegiatannya adalah Persentase Koperasi Yang Difasilitasi Izin Pembentukan dan atau Pembukaan Cabang/Kantor Koperasinya sebesar 100 persen dengan sub kegiatannya yaitu :
 - a) Sub kegiatan Fasilitasi Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi

dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Rp. Rp. 265.803.000,- dengan indikator sub kegiatannya adalah Jumlah Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi sebanyak 14 unit usaha

III. Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi Rp. 150.000.000,- terdiri dari 1 kegiatan dan 2 sub kegiatan yaitu :

1. Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Rp. 150.000.000,- dengan indikator kegiatannya Persentase Koperasi Yang Diawasi Kelembagaan Dan Diperiksa Yang Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sebanyak 100 persen. Kegiatan ini terdiri dari 2 sub kegiatan yaitu:

- a) Sub kegiatan Meningkatkan Akuntabilitas Kepercayaan Kepatuhan Kesenambungan dan Memberikan Manfaat yang Sebesar-Besarnya kepada Anggota dan Masyarakat Rp. 75.000.000,- dengan indikatornya yaitu Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Akuntabilitas, Kepercayaan, Kepatuhan, Kesenambungan, dan Pemberian Manfaat kepada Anggota KUKM dan Masyarakat sebanyak 1 dokumen
- b) Sub kegiatan Peningkatan Kepatuhan Koperasi Terhadap Peraturan Perundang-Undangan dan Terbentuknya Koperasi yang Kuat Sehat Mandiri Tangguh serta Akuntabel Rp. 75.000.000,- indikatornya adalah Jumlah Koperasi Yang Memenuhi Peraturan Perundang-Undangan dan Tersedianya Koperasi yang Kuat, Sehat, Mandiri, Tangguh, serta Akuntabel sebanyak 30 unit usaha

IV. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Rp. 100.000.000,- terdiri dari 1 Kegiatan dan 1 sub kegiatan yaitu :

1. Kegiatan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Rp. Rp. 100.000.000,-

indikatornya adalah Persentase KSP/USP Yang Dinilai Kesehatannya sebanyak 100 persen dengan sub kegiatan yaitu :

- a) Sub kegiatan Mengukur Tingkat Kesehatan Koperasi Rp. 100.000.000,- dengan indikator sub kegiatan Jumlah Koperasi Hasil Pengukuran Tingkat Kesehatan sebanyak 30 unit usaha

**V. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Rp. 2.885.489.800,-
Terdiri dari 1 Kegiatan dan 1 Sub Kegiatan Yaitu :**

1. Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Rp. 2.885.489.800,- indikatornya adalah Persentase SDM Koperasi Yang Meningkatkan Kompetensi dan Pengetahuannya sebesar 100 persen
 - a) Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi Rp. 2.885.489.800,- indikatornya adalah Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian sebanyak 1.019 orang

Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik sebesar Rp. 2.419.964.000,- (*dua milyar empat ratus sembilan belas juta sembilan ratus enam puluh empat ribu rupiah*) yang akan digunakan untuk pelatihan-pelatihan bagi koperasi dan umkm sebanyak 21 Pelatihan dengan total peserta yang dilatih sebanyak 919 orang yang terdiri dari 210 orang koperasi, 675 UMKM dan 34 orang tenaga pendamping dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.1.6. Pelatihan yang bersumber dari DAK Non Fisik Koperasi dan UKM Provinsi Lampung pada APBD T.A 2022

NO	NAMA PELATIHAN	LOKASI	JUMLAH PESERTA
1.	Pelatihan Berbasis E-Commerce Bagi UMKM	Provinsi Lampung	35 Orang
2.	Pelatihan Pengembangan Pemasaran Berbasis Digital Bagi Wirausaha Muda	Provinsi Lampung	35 Orang
3.	Pelatihan Vocasional Olahan Makanan hasil Hortikultura	Lampung Barat	35 Orang
4.	Pelatihan Kewirausahaan Usaha Bagi Kelompok Wanita Meninial	Provinsi Lampung	40 Orang
5.	Pelatihan Manajemen Usaha Bagi Kelompok Wanita	Provinsi Lampung	35 Orang
6.	Pelatihan Menjadi Eksportir Berbasis SKKNI	Provinsi Lampung	35 Orang
7.	Pembekalan Tenaga Pendamping PK2UMK	Provinsi	34 Orang

NO	NAMA PELATIHAN	LOKASI	JUMLAH PESERTA
		Lampung	
8.	Pelatihan Vocasional Bidang Pariwisata (Home Stay, Pengolahan Makanan dan Minuman	Pesisir Barat	35 Orang
9.	Pelatihan Vocasional Bidang Desain dan Kemasan Produk UMK di Mesuji	Mesuji	35 Orang
10.	Pelatihan Tatalaksana RAT Bagi Koperasi di Lampung Selatan	Lampung Selatan	35 Orang
11.	Pelatihan Pengawasan Pencatatan Laporan Keuangan Usaha Bagi UMKM	Provinsi Lampung	35 Orang
12.	Pelatihan Pengawasan Terhadap Restorasi Peren-canaan Strategi dan Operasional bagi KSP/USP	Provinsi Lampung	35 Orang
13.	Pelatihan Administrasi Pembu- kuan bagi Kopearsi Baru	Provinsi Lampung	35 Orang
14.	Pelatihan Sertifikasi Kompetensi bagi Pengurus / Ke pala Cabang KSPPS	Provinsi Lampung	35 Orang
15.	Pelatihan Pertanggungjawaban Laporan Pengurus / Pengawas Dalam RAT Kopearsi	Provinsi Lampung	35 Orang
16.	Pelatihan Vocasional Desain label dan Kemasan Produk Bagi UMK di Kab. Way Kanan	Way Kanan	35 Orang
17.	Pelatihan Sertifikasi Kompetensi Bagi Kepala Cabang / Manajer KSP / USP	Provinsi Lampung	35 Orang
18.	Penyuluhan Hukum Terkait Penyusunan Dokumen Kontrak Kerjasama Bagi UMK	Provinsi Lampung	80 Orang
19.	Penyuluhan Hukum Terkait Prosedur Pelaksanaan Kegiatan Ekspor Barang Bagi UMK	Provinsi Lampung	80 Orang
20.	Penyuluhan Hukum Kemudahan Akses Perizinan Berusaha Bagi UMK	Provinsi Lampung	80 Orang
21.	Penyuluhan Hukum Terkait Sistem Jaminan Halal Bagi UMK	Provinsi Lampung	80 Orang

VI. Program Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi Rp. 647.840.000,- terdiri dari 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan yaitu :

1. Kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Rp. 647.840.000,- indikator kegiatannya adalah Persentase Koperasi Yang Mendapat Fasilitas Pengembangan dan Perlindungan Usaha sebanyak 100 persen. Sub kegiatannya adalah sebagai berikut :
 - a) Sub Kegiatan Peningkatan Produktivitas Nilai Tambah Akses Pasar Akses Pembiayaan Penguatan Kelembagaan Penataan Manajemen Standarisasi dan Restrukturisasi Usaha Rp. 647.840.000,- indikator sub kegiatannya adalah Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan

Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha sebanyak 30 unit usaha

VII. Program Pemberdayaan Usaha Menengah Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM) Rp. 2.422.840.000,- terdiri dari 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan yaitu :

1. Kegiatan Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan Kemitraan Kemudahan Perijinan Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan Rp. 2.422.840.000,- indikator kegiatannya adalah Persentase UMKM dan Wirausaha Pemula Yang Difasilitasi Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan sebanyak 100 persen. Sub kegiatannya adalah sebagai berikut :

a) Sub Kegiatan Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja Pemerataan Pendapatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan Rp. 2.422.840.000,- indikator sub kegiatannya adalah Jumlah Unit Usaha UMKM yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan dengan target 190 unit usaha

VIII. Program Pengembangan UMKM Rp. 404.660.000,- terdiri dari 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan yaitu :

1. Kegiatan Pengembangan Usaha Kecil Dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah Rp. 404.660.000,- indikator kegiatannya adalah Persentase Usaha Kecil Yang Difasilitasi Pengembangan Usaha Dari Sisi Permodalan, Produksi dan Pemasaran serta Jaringan Usahnya sebanyak 100 persen. Sub kegiatannya sebagai berikut :

a) Sub Kegiatan Produksi dan Pengolahan Pemasaran Sumber Daya Manusia serta Desain dan Teknologi Rp. 404.660.000,- dengan indikator sub kegiatannya Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi sebanyak 45 unit usaha

2.2 Kesesuaian Program/Kegiatan/Subkegiatan Antara RENJA Perangkat Daerah Dengan APBD Tahun 2022

Dibawah ini adalah tabel perbandingan program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung antara RENJA dengan APBD Tahun 2022.

Tabel 2.2.1. Kesesuaian Program/Kegiatan/Subkegiatan Antara RENJA Perangkat Daerah Dengan APBD 2022

KODE REK						URUSAN BIDANG	RKPD	APBD	KET
2.						URUSAN PEMERINTAH WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN PELAYANAN DASAR			
2.	17.					BIDANG KOPERASI DAN UKM			
2.	17.	01.				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	√	√	
2.	17.	01.	1.	01.		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	√	√	
2.	17.	01.	1.	01.	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	√	√	
2.	17.	01.	1.	01.	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	√	√	
2.	17.	01.	1.	02.		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	√	√	
2.	17.	01.	1.	02.	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	√	√	
2.	17.	01.	1.	02.	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	√	√	
2.	17.	01.	1.	02.	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	√	√	
2.	17.	01.	1.	02.	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	√	√	
2.	17.	01.	1.	03.		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	√	√	
2.	17.	01.	1.	03.	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	√	√	
2.	17.	01.	1.	03.	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	√	√	
2.	17.	01.	1.	06.		Administrasi Umum Perangkat Daerah	√	√	
2.	17.	01.	1.	06.	01	Penyediaan Komponen instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	√	√	
2.	17.	01.	1.	06.	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	√	√	
2.	17.	01.	1.	06.	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	√	√	
2.	17.	01.	1.	06.	07	Penyediaan Bahan Material	√	√	
2.	17.	01.	1.	06.	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	√	√	
2.	17.	01.	1.	06.	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	√	√	
2.	17.	01.	1.	08.		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	√	√	
2.	17.	01.	1.	08.	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	√	√	
2.	17.	01.	1.	08.	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	√	√	
2.	17.	01.	1.	09.		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	√	√	
2.	17.	01.	1.	09.	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	√	√	
2.	17.	01.	1.	09.	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	√	√	
2.	17.	01.	1.	09.	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	√	√	
2.	17.	01.	1.	09.	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	√	√	
2.	17.	02.				PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	√	√	
2.	17.	02.	1.	01.		Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	√	√	

KODE REK						URUSAN BIDANG	RKPD	APBD	KET
2.	17.	02.	1.	01.	01.	Fasilitasi Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	√	√	
2.	17.	02.	1.	02.		Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	√	√	
2.	17.	02.	1.	02.	01.	Fasilitasi Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	√	√	
2.	17.	03.				PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	√	√	
2.	17.	03.	1.	01.		Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	√	√	
2.	17.	03.	1.	01.	01.	Meningkatkan Akuntabilitas Kepercayaan Kepatuhan Kesenambungan dan Memberikan Manfaat yang Sebesar-Besarnya ke pada Anggota dan Masyarakat	√	√	
2.	17.	03.	1.	01.	02.	Peningkatan Kepatuhan Koperasi Terhadap Peraturan Perundang-Undangan dan Terbentuknya Koperasi yang Kuat Sehat Mandiri Tangguh serta Akuntabel	√	√	
2.	17.	04.				PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	√	√	
2.	17.	04.	1.	01.		Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	√	√	
2.	17.	04.	1.	01.	02.	Mengukur Tingkat Kesehatan Koperasi	√	√	
2.	17.	05.				PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	√	√	
2.	17.	05.	1.	01.		Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	√	√	
2.	17.	05.	1.	01.	01.	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	√	√	
2.	17.	06.				PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	√	√	
2.	17.	06.	1.	01.		Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	√	√	
2.	17.	06.	1.	01.	02.	Peningkatan Produktivitas Nilai Tambah Akses Pasar Akses Pembiayaan Penguatan Kelembagaan Penataan Manajemen Standarisasi dan Restrukturisasi Usaha	√	√	
2.	17.	07.				PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH USAHA KECIL DAN USAHA MIKRO (UMKM)	√	√	
2.	17.	07.	1.	01.		Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan Kemitraan Kemudahan Perijinan Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	√	√	
2.	17.	07.	1.	01.	01.	Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja Pemerataan Pendapatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan	√	√	
2.	17.	08.				PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	√	√	
2.	17.	08.	1.	01.		Pengembangan Usaha Kecil Dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah	√	√	
2.	17.	08.	1.	01.	01.	Produksi dan Pengolahan Pemasaran Sumber Daya Manusia serta Desain dan Teknologi	√	√	

2.3 Kesesuaian Program, Kegiatan, Pagu Pendanaan, Indikator dan Target Kinerja Antara Dokumen Renja dengan Renstra Perangkat Daerah

Dari uraian pada poin 2.1. diatas dapat diketahui bahwa Renja APBD tahun 2022 terdapat 8 (delapan) program dan 14 (empat belas) kegiatan serta 29 (dua puluh sembilan) sub kegiatan dalam Perubahan Renstra Dinas Koperasi dan UKM 2019-2024. Adapun rekap rincian jumlah kegiatan pada Renja tahun 2022 yang didanai melalui APBD 2022 adalah sebagai berikut :

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi terdiri dari 6 kegiatan dan 20 sub kegiatan
- 2) Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam terdiri dari 2 kegiatan dan 2 sub kegiatan
- 3) Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi terdiri dari 1 kegiatan dan 2 sub kegiatan
- 4) Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi terdiri dari 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan
- 5) Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian terdiri dari 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan
- 6) Program Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi terdiri dari 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan
- 7) Program Pemberdayaan Usaha Menengah Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM) terdiri dari 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan
- 8) Program Pengembangan UMKM terdiri dari 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan

Jika dibandingkan dengan Perubahan Renstra Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung periode 2019–2024 juga terdapat 8 (delapan) program dan 15 (Lima belas) kegiatan serta 35 (tiga puluh lima) sub kegiatan. Maka pada Renja Tahun 2022 ada 1 kegiatan dan 6 sub kegiatan pada Perubahan Renstra Tahun 2019-2024 yang belum terakomodir dikarenakan keterbatasan dana yang ada. Berikut adalah program yang pada Perubahan Renstra Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Lampung Periode 2019-2024 :

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi terdiri dari 8 kegiatan dan 25 sub kegiatan

- 2) Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam terdiri dari 2 kegiatan dan 2 sub kegiatan
- 3) Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi terdiri dari 1 kegiatan dan 2 sub kegiatan
- 4) Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi terdiri dari 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan
- 5) Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian terdiri dari 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan
- 6) Program Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi terdiri dari 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan
- 7) Program Pemberdayaan Usaha Menengah Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM) terdiri dari 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan
- 8) Program Pengembangan UMKM terdiri dari 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan

III. CAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH

3.1 Realisasi Capaian Indikator Kinerja Utama Kepala Perangkat Daerah Triwulan IV (Semester II)

Tabel 3.1.1. Realisasi Capaian Indikator Kinerja Utama Kepala Perangkat Daerah Triwulan IV (Semester II)

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2022	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN (6/5* 100)
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya Daya Saing Koperasi dan UMKM untuk mendukung pertumbuhan ekonomi	1. Meningkatnya Koperasi Yang Berkualitas	1 Persentase Koperasi Yang Berkualitas	34,26 %	32,61 %	95,18 %
		1. Meningkatnya Usaha Kecil Yang Menjadi Wirausaha	1 Persentase Usaha Kecil Yang Menjadi Wirausaha (Akumulasi)	3,29 %	4,84 %	147,13 %

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa pencapaian sasaran RENSTRA Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung sudah memenuhi harapan dimana dari ke 2 indikator yaitu Persentase Koperasi Yang Berkualitas dari target 34,26 persen yang ditargetkan di tahun 2022 tercapai tercapai 32,61 persen atau dengan tingkat capaian sebesar 95,18persen. Untuk indiator yang kedua yaitu Persentase Usaha Kecil Yang Menjadi Wirausaha (Akumulasi) dari target sebesar 3,29 persen terealisasi 4,84 persen atau sebesar 147,13. Capaian ini tidak terlepas dari mulai membaiknya dunia usaha di Indonesia khususnya Provinsi Lampung dan capaian ini sangat baik dibandingkan dengan triwulan sebelumnya dan juga mengingat masih pada triwulan 4 tahun 2022 dunia usaha sudah mulai bangkit pasca covid 19.

3.2 Realisasi Capaian Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Anggaran Rencana Kerja Perangkat Daerah Triwulan IV Tahun 2022

Dibawah ini adalah tabel persentase rata-rata capaian kinerja perprogram tahun 2022. Persentase rata-rata capaian kinerja ini dihitung dengan membandingkan target kinerja baik fisik maupun keuangan kegiatan tahun 2022

dengan realisasi kinerja fisik maupun keuangan kegiatan di tahun 2022 dikali 100 persen. Berikut adalah tabel rata-rata pencapaian kinerja program di Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2022.

Tabel 3.2.1. Persentase Capaian Anggaran Program Renja Tahun 2022 s/d Triwulan IV

NO	PROGRAM	REALISASI (PERSEN)
1	2	3
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	96,14
2	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	98,22
3	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	99,93
4	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	99,95
5	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	99,35
6	Program Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	98,66
7	Program Pemberdayaan Usaha Menengah Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	92,77
8	Program Pengembangan UMKM	98,06
	RATA-RATA JUMLAH	96,43

Dari 8 Program yang ada di Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung, capaian rata-rata realisasi anggaran sudah sangat tinggi yaitu sebesar 96,43 persen dikarenakan sudah semua program dilaksanakan meskipun terdapat beberapa kendala yang dihadapi salahsatunya tidak lancarnya penyediaan dana juga memengaruhi kinerja anggaran pada Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung. Realisasi keuangan tertinggi terdapat pada Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi sebesar 99,93 persen dan terendah ada pada Program Pemberdayaan Usaha Menengah Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM) sebesar 92,77 persen.

Tabel 3.2.2. Persentase Capaian Kinerja Program Renja Tahun 2021 s/d Triwulan IV

NO	PROGRAM	TARGET (PERSEN)	REALISASI (PERSEN)	TINGKAT CAPAIAN
1	2	3	4	$5=4/3*100$
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100	100	100,00
2	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	41,98	43,38	103,33
3	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	37,74	36,96	97,96
4	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	64,29	61,36	95,45
5	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	26,55	31,01	116,77
6	Program Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	14,15	14,23	100,59
7	Program Pemberdayaan Usaha Menengah Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	0,5	0,48	96,33
8	Program Pengembangan UMKM	6,07	7,09	116,68
	RATA-RATA JUMLAH			103,39

Dari tabel diatas dapat di lihat bahwa capaian kinerja program Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung Tahun 2022 sudah melampaui target yaitu rata-rata sebesar 103,39 persen dengan capaian terendah ada pada program Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi sebesar 95,45 persen sedangkan capaian tertinggi ada pada Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian sebesar 116,77 persen. Adapun realisasi capaian kinerja kegiatan sampai dengan triwulan 4 tahun 2022 dapat dilihat pada uraian berikut (rincian pada lampiran 3.2).

Adapun realisasi capaian kinerja kegiatan sampai dengan triwulan 4 tahun 2022 dapat dilihat pada uraian berikut (rincian dapat dilihat pada lampiran 3.2.3).

➤ **Program Penunjang (1 program) terdiri dari :**

I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Rp. 12.751.297.333,55,- realisasi keuangannya yaitu Rp. 12.258.630.811,- terdiri dari 6 kegiatan yaitu:

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Rp. 81.358.000,- Indikatornya adalah Persentase Keselarasan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan target 100 Persen. Realisasi keuangannya sebesar Rp. 76.596.600,- Sub kegiatannya adalah sebagai berikut :
 - a) Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Rp. 54.800.000,- indikatornya jumlah dokumen perencanaan sebanyak 12 dokumen. Realisasi keuangannya sebesar Rp. 50.038.600,- dan realisasi fisik kinerjanya sebesar 100 persen.
 - b) Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Rp. 26.558.000,- indikatornya jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah sebanyak 11 laporan. Realisasi keuangannya sebesar Rp. 26.558.000,- dan realisasi fisik kinerjanya sebesar 100 persen.
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Rp. 9.772.046.241,93,- Indikatornya adalah Persentase Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sebesar 100 persen. Realisasi keuangannya sebesar Rp. 9.607.489.210,- Sub kegiatannya adalah sebagai berikut :
 - a) Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Rp. 9.722.046.241,93,- indikatornya jumlah orang yang menerima gaji dan

tunjangan ASN sebanyak 75 orang/bulan. Realisasi keuangannya sebesar Rp. 9.557.489.210,- dan realisasi fisik kinerjanya sebesar 100 persen.

b) Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Rp. 10.000.000,- indikatornya Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD sebanyak 36 dokumen. Realisasi keuangannya sebesar Rp. 10.000.000,- dan realisasi fisik kinerjanya sebesar 100 persen.

c) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Rp. 10.000.000,- indikatornya Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD sebanyak 1 laporan. Realisasi keuangannya sebesar Rp. 9.557.489.210,- dan realisasi fisik kinerjanya sebesar 100 persen.

d) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Rp. 30.000.000,- indikatornya Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD sebanyak 17 laporan. Realisasi keuangannya sebesar Rp. 30.000.000,- dan realisasi fisik kinerjanya sebesar 100 persen.

3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Rp. 20.000.000,- Indikatornya adalah Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah dengan target 100 persen. Realisasi keuangannya sebesar Rp. 19.445.000,- dan realisasi fisik kinerjanya sebesar 100 persen. Sub kegiatannya adalah sebagai berikut :

a) Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Rp. 10.000.000,- indikatornya Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD sebanyak 1 laporan. Realisasi keuangannya sebesar Rp. 9.815.000,- dan realisasi fisik kinerjanya sebesar 100 persen.

- b) Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Rp. 10.000.000,- indikatornya Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD sebanyak 1 laporan. Realisasi keuangannya sebesar Rp. 9.630.000,- dan realisasi fisik kinerjanya sebesar 100 persen.
4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Rp. 702.378.245,62,- Indikatornya adalah Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah sebanyak 100 persen. Realisasi keuangannya sebesar Rp. 700.975.301,- dan realisasi fisik kinerjanya sebesar 100 persen. Sub kegiatannya adalah sebagai berikut :
- a) Sub Kegiatan Penyediaan Komponen instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Rp. 10.000.000,- indikatornya Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan sebanyak 12 paket. Realisasi keuangannya sebesar Rp. 9.956.600,- dan realisasi fisik kinerjanya sebesar 100 persen.
- b) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Rp. 25.000.000,- indikatornya Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan sebanyak 12 paket. Realisasi keuangannya sebesar Rp. 25.000.000,- dan realisasi fisik kinerjanya sebesar 100 persen.
- c) Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Rp. 13.936.456,62,- indikatornya Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan sebanyak 12 paket. Realisasi keuangannya sebesar Rp. 13.936.400,- dan realisasi fisik kinerjanya sebesar 100 persen.
- d) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Material Rp. 65.000.000,- indikatornya Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan sebanyak 12 paket. Realisasi keuangannya sebesar Rp. 64.869.500,- dan realisasi fisik kinerjanya sebesar 100 persen.
- e) Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu Rp. 40.000.000,- indikatornya Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu sebanyak 12 laporan. Realisasi keuangannya sebesar Rp. 39.901.000,- dan realisasi fisik kinerjanya sebesar 100 persen.

- f) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Rp. 548.442.000,- indikatornya Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD sebanyak 12 laporan. Realisasi keuangannya sebesar Rp. 547.311.801,- dan realisasi fisik kinerjanya sebesar 100 persen.
5. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Rp. 1.691.847.000,- indikatornya adalah Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sebesar 100 persen. Realisasi keuangannya sebesar Rp. 1.530.939.070,- dan realisasi fisik kinerjanya sebesar 100 persen. Sub kegiatannya adalah sebagai berikut :
- a) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Rp. 236.847.000,- indikatornya Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan sebanyak 12 laporan. Realisasi keuangannya sebesar Rp. 184.553.470,- dan realisasi fisik kinerjanya sebesar 100 persen.
- b) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Rp. 1.455.000.000,- indikatornya Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan sebanyak 12 laporan. Realisasi keuangannya sebesar Rp. 1.346.385.600,- dan realisasi fisik kinerjanya sebesar 100 persen.
6. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Rp. 483.667.635,- indikatornya adalah Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sebesar 100 persen. Realisasi keuangannya sebesar Rp. 323.185.630,- dan realisasi fisik kinerjanya sebesar 100 persen. Sub kegiatannya adalah sebagai berikut :
- a) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Rp. 95.000.000,- Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya sebanyak 1 unit. Realisasi keuangannya sebesar Rp. 41.964.195,- dan realisasi fisik kinerjanya sebesar 100 persen.

- b) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Rp. 309.000.000,- Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya sebanyak 9 unit. Realisasi keuangannya sebesar Rp. 202.152.435,- dan realisasi fisik kinerjanya sebesar 100 persen.
- c) Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Rp. 29.667.635,- indikatornya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara sebanyak 12 unit. Realisasi keuangannya sebesar Rp. 29.650.000,- dan realisasi fisik kinerjanya sebesar 100 persen.
- d) Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Rp. 50.000.000,- indikatornya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi sebanyak 1 unit. Realisasi keuangannya sebesar Rp. 49.419.000,- dan realisasi fisik kinerjanya sebesar 100 persen.

➤ **Program Utama (7 Program) terdiri dari :**

II. Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam 511.500.000, Realisasi keuangannya sebesar Rp. 505.443.000,- terdiri dari 2 kegiatan dan 2 sub kegiatan yaitu :

- 1. Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Rp. 245.697.000,- indikator Persentase Kelompok/Koperasi Yang Diberi Penyuluhan Kelembagaan dan Izin Usaha Koperasi sebesar 100 persen Realisasi keuangannya sebesar Rp. 245.640.000,- dan realisasi fisik kinerjanya sebesar 100 persen dengan sub kegiatan yaitu :
 - a) Sub kegiatan Fasilitasi Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Rp. 245.697.000,- dengan indikator sub kegiatan yaitu Jumlah Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1(Satu) Daerah Provinsi yang Memiliki Usaha Simpan Pinjam sebanyak 11 unit usaha. Realisasi keuangannya

sebesar Rp. 245.640.000,- dan realisasi fisik kinerjanya sebesar 100 persen

2. Kegiatan Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Rp. 265.803.000,- indikator kegiatannya adalah Persentase Koperasi Yang Difasilitasi Izin Pembentukan dan atau Pembukaan Cabang/Kantor Koperasinya sebesar 100 persen. Realisasi keuangannya sebesar Rp. 259.803.000,- dan realisasi fisik kinerjanya sebesar 100 persen dengan sub kegiatannya yaitu :

- a) Sub kegiatan Fasilitas Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Rp. Rp. 265.803.000,- dengan indikator sub kegiatannya adalah Jumlah Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi sebanyak 14 unit usaha. Realisasi keuangannya sebesar Rp. 259.803.000,- dan realisasi fisik kinerjanya sebesar 100 persen.

III. Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi Rp. 150.000.000,- Realisasi keuangannya sebesar Rp. 149.888.400,- terdiri dari 1 kegiatan dan 2 sub kegiatan yaitu :

1. Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Rp. 150.000.000,- dengan indikator kegiatannya Persentase Koperasi Yang Diawasi Kelembagaan Dan Diperiksa Yang Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sebanyak 100 persen. Realisasi keuangannya sebesar Rp. 149.888.400,- dan realisasi fisik kinerjanya sebesar 100 persen. Kegiatan ini terdiri dari 2 sub kegiatan yaitu:
 - a) Sub kegiatan Meningkatkan Akuntabilitas Kepercayaan Kepatuhan Kesyntambungan dan Memberikan Manfaat yang Sebesar-Besarnya ke pada Anggota dan Masyarakat Rp. 75.000.000,- dengan indikatornya

yaitu Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Akuntabilitas, Kepercayaan, Kepatuhan, Kesenambungan, dan Pemberian Manfaat ke pada Anggota KUKM dan Masyarakat sebanyak 1 dokumen. Realisasi keuangannya sebesar Rp. 74.989.000,- dan realisasi fisik kinerjanya sebesar 100 persen.

- b) Sub kegiatan Peningkatan Kepatuhan Koperasi Terhadap Peraturan Perundang-Undangan dan Terbentuknya Koperasi yang Kuat Sehat Mandiri Tangguh serta Akuntabel Rp. 75.000.000,- indikatornya adalah Jumlah Koperasi Yang Memenuhi Peraturan Perundang-Undangan dan Tersedianya Koperasi yang Kuat, Sehat, Mandiri, Tangguh, serta Akuntabel sebanyak 30 unit usaha. Realisasi keuangannya sebesar Rp. 74.899.400,- dan realisasi fisik kinerjanya sebesar 100 persen.

IV. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Rp. 100.000.000,- Realisasi keuangannya sebesar Rp. 99.946.570,- terdiri dari 1 Kegiatan dan 1 sub kegiatan yaitu :

1. Kegiatan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Rp. Rp. 100.000.000,- indikatornya adalah Persentase KSP/USP Yang Dinilai Kesehatannya sebanyak 100 persen. Realisasi keuangannya sebesar Rp. 99.946.570,- dan realisasi fisik kinerjanya sebesar 100 persen dengan sub kegiatan yaitu :
- a) Sub kegiatan Mengukur Tingkat Kesehatan Koperasi Rp. 100.000.000,- dengan indikator sub kegiatan Jumlah Koperasi Hasil Pengukuran Tingkat Kesehatan sebanyak 30 unit usaha. Realisasi keuangannya sebesar Rp. 99.946.570,- dan realisasi fisik kinerjanya sebesar 100 persen.

V. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Rp. 2.885.489.800,- Realisasi keuangannya sebesar Rp. 2.866.678.150,- Terdiri dari 1 Kegiatan dan 1 Sub Kegiatan Yaitu :

1. Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Rp. 2.885.489.800,- indikatornya adalah Persentase SDM Koperasi Yang

Meningkat Kompetensi dan Pengetahuannya sebesar 100 persen. Realisasi keuangannya sebesar Rp. 2.866.678.150,- dan realisasi fisik kinerjanya sebesar 100 persen.

a) Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi Rp. 2.885.489.800,- indikatornya adalah Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian sebanyak 1.019 orang. Realisasi keuangannya sebesar Rp. 2.866.678.150,- dan realisasi fisik kinerjanya sebesar 100 persen.

Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik sebesar Rp. 2.419.964.000,- (*dua milyar empat ratus sembilan belas juta sembilan ratus enam puluh empat ribu rupiah*) yang akan digunakan untuk pelatihan-pelatihan bagi koperasi dan umkm sebanyak 21 Pelatihan dengan total peserta yang dilatih sebanyak 919 orang yang terdiri dari 210 orang koperasi, 675 UMKM dan 34 orang tenaga pendamping dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.1.6. Pelatihan yang bersumber dari DAK Non Fisik Koperasi dan UKM Provinsi Lampung pada APBD T.A 2022

NO	NAMA PELATIHAN	LOKASI	JUMLAH PESERTA
1.	Pelatihan Berbasis E-Commerce Bagi UMKM	Provinsi Lampung	35 Orang
2.	Pelatihan Pengembangan Pemasaran Berbasis Digital Bagi Wirausaha Muda	Provinsi Lampung	35 Orang
3.	Pelatihan Vocasional Olahan Makanan hasil Hortikultura	Lampung Barat	35 Orang
4.	Pelatihan Kewirausahaan Usaha Bagi Kelompok Wanita Meninial	Provinsi Lampung	40 Orang
5.	Pelatihan Manajemen Usaha Bagi Kelompok Wanita	Provinsi Lampung	35 Orang
6.	Pelatihan Menjadi Eksportir Berbasis SKKNI	Provinsi Lampung	35 Orang
7.	Pembekalan Tenaga Pendamping PK2UMK	Provinsi Lampung	34 Orang
8.	Pelatihan Vocasional Bidang Pariwisata (Home Stay, Pengolahan Makanan dan Minuman	Pesisir Barat	35 Orang
9.	Pelatihan Vocasional Bidang Desain dan Kemasan Produk UMK di Mesuji	Mesuji	35 Orang
10.	Pelatihan Tatalaksana RAT Bagi Koperasi di Lampung Selatan	Lampung Selatan	35 Orang
11.	Pelatihan Pengawasan Pencatatan Laporan Keuangan Usaha Bagi UMKM	Provinsi Lampung	35 Orang
12.	Pelatihan Pengawasan Terhadap Restorasi Perencanaan Strategi dan Operasional bagi KSP/USP	Provinsi Lampung	35 Orang
13.	Pelatihan Administrasi Pembukuan bagi Kopearsi Baru	Provinsi Lampung	35 Orang
14.	Pelatihan Sertifikasi Kompetensi bagi Pengurus / Kepala Cabang KSPPS	Provinsi Lampung	35 Orang
15.	Pelatihan Pertanggungjawaban Laporan Pengurus /	Provinsi Lampung	35 Orang

NO	NAMA PELATIHAN	LOKASI	JUMLAH PESERTA
	Pengawas Dalam RAT Kopearsi		
16.	Pelatihan Vocasional Desain label dan Kemasan Produk Bagi UMK di Kab. Way Kanan	Way Kanan	35 Orang
17.	Pelatihan Sertifikasi Kompetensi Bagi Kepala Cabang / Manajer KSP / USP	Provinsi Lampung	35 Orang
18.	Penyuluhan Hukum Terkait Penyusunan Dokumen Kontrak Kerjasama Bagi UMK	Provinsi Lampung	80 Orang
19.	Penyuluhan Hukum Terkait Prosedur Pelaksanaan Kegiatan Ekspor Barang Bagi UMK	Provinsi Lampung	80 Orang
20.	Penyuluhan Hukum Kemudahan Akses Perizinan Berusaha Bagi UMK	Provinsi Lampung	80 Orang
21.	Penyuluhan Hukum Terkait Sistem Jaminan Halal Bagi UMK	Provinsi Lampung	80 Orang

VI. Program Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi Rp. 647.840.000,- Realisasi keuangannya sebesar Rp. 639.171.000,- terdiri dari 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan yaitu :

1. Kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Rp. 647.840.000,- indikator kegiatannya adalah Persentase Koperasi Yang Mendapat Fasilitas Pengembangan dan Perlindungan Usaha sebanyak 100 persen. Realisasi keuangannya sebesar Rp. 639.171.000,- dan realisasi fisik kinerjanya sebesar 100 persen. Sub kegiatannya adalah sebagai berikut :
 - a) Sub Kegiatan Peningkatan Produktivitas Nilai Tambah Akses Pasar Akses Pembiayaan Penguatan Kelembagaan Penataan Manajemen Standarisasi dan Restrukturisasi Usaha Rp. 647.840.000,- indikator sub kegiatannya adalah Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha sebanyak 30 unit usaha. Realisasi keuangannya sebesar Rp. 639.171.000,- dan realisasi fisik kinerjanya sebesar 100 persen.

VII. Program Pemberdayaan Usaha Menengah Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM) Rp. 2.422.840.000,- Realisasi keuangannya sebesar Rp. 2.247.674.897,- terdiri dari 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan yaitu :

1. Kegiatan Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan Kemitraan Kemudahan Perijinan Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan Rp. 2.422.840.000,- indikator

kegiatannya adalah Persentase UMKM dan Wirausaha Pemula Yang Difasilitasi Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan sebanyak 100 persen. Realisasi keuangannya sebesar Rp. 2.247.674.897,- dan realisasi fisik kinerjanya sebesar 100 persen. Sub kegiatannya adalah sebagai berikut :

- a) Sub Kegiatan Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja Pemerataan Pendapatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan Rp. 2.422.840.000,- indikator sub kegiatannya adalah Jumlah Unit Usaha UMKM yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan dengan target 190 unit usaha. Realisasi keuangannya sebesar Rp. 2.247.674.897,- dan realisasi fisik kinerjanya sebesar 100 persen.

VIII. Program Pengembangan UMKM Rp. 404.660.000,- Realisasi keuangannya sebesar Rp. 396.803.000,- terdiri dari 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan yaitu :

1. Kegiatan Pengembangan Usaha Kecil Dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah Rp. 404.660.000,- indikator kegiatannya adalah Persentase Usaha Kecil Yang Difasilitasi Pengembangan Usaha Dari Sisi Permodalan, Produksi dan Pemasaran serta Jaringan Usahanya sebanyak 100 persen. Realisasi keuangannya sebesar Rp. 396.803.000,- dan realisasi fisik kinerjanya sebesar 100 persen. Sub kegiatannya sebagai berikut :
 - a) Sub Kegiatan Produksi dan Pengolahan Pemasaran Sumber Daya Manusia serta Desain dan Teknologi Rp. 404.660.000,- dengan indikator sub kegiatannya Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi sebanyak 45 unit usaha. Realisasi keuangannya sebesar Rp. 396.803.000,- dan realisasi fisik kinerjanya sebesar 100 persen.

IV. HAMBATAN DAN KENDALA

4.1 Hambatan dan Kendala

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja dan evaluasi kinerja untuk pelaksanaan Renja Tahun 2022 Triwulan IV dan uraian pada halaman terdahulu maka dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa hambatan dan kendala yang dihadapi oleh Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung dalam merealisasikan pelaksanaan Renja tahun 2022 s/d Triwulan IV adalah sebagai berikut :

1. Dari hasil pengukuran kinerja dan evaluasi kinerja untuk pelaksanaan Renja Tahun 2022 s/d Triwulan IV capaian kinerja masih sejalan dengan target yang di rencanakan meskipun belum maksimalnya penyediaan dana kegiatan yang mengakibatkan beberapa kegiatan harus di tunda terlebih dahulu.

4.2 Upaya Pemecahan Masalah

Upaya pemecahan masalah yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung terkait dengan pencapaian kinerja tahun 2022 Triwulan IV yaitu sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan kembali koordinasi dengan Badan Keuangan Provinsi Lampung sebagai otoritas pemegang penyediaan dana program/kegiatan sehingga memperlancar pelaksanaan program/kegiatan pada Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung.
2. Mengoptimalkan kembali koordinasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung sebagai otoritas perencanaan di Provinsi Lampung terkait perencanaan program/kegiatan sehingga sinergi antara perencanaan dan penganggaran lebih optimal sehingga memperlancar pencapaian kinerja Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung.

V. PENUTUP

5.1 Simpulan

Dari uraian yang telah disampaikan dapat disimpulkan bahwa:

- 1) Pelaksanaan Renja Tahun 2022 Triwulan IV sudah berjalan sebagaimana yang telah di targetkan meskipun terdapat keterbatasan anggaran pada Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung.
- 2) Adanya capaian kinerja pada tahun 2022 Triwulan IV pada Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung sudah dalam target yang diharapkan meskipun ada beberapa kendala terutama belum lancarnya penyediaan anggaran.

5.2 Rekomendasi

Memperhatikan kendala-kendala yang dihadapi, disarankan hal-hal sebagai berikut :

1. Sesuai dengan Permendagri 86 tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah maka dalam menyusun rencana kerja tahun berikutnya agar tetap mengacu pada Renstra yang ada, sehingga kesesuaian antara Renstra, RPJMD, RKPD dan Renja dapat konsisten sesuai dengan apa yang telah di rencanakan, dengan demikian target kinerja maupun penyerapan anggaran dapat berjalan sesuai dengan yang direncanakan.
2. Dioptimalkan lagi penyediaan dana untuk menunjang tercapainya target kegiatan.
3. Mengupayakan peningkatan Sumber Daya Manusia melalui pelatihan teknis dan fungsional yang berkesinambungan dan mengupayakan pengadaan sarana dan prasarana kerja, guna meningkatkan daya dukung yang mampu menghasilkan kinerja yang optimal.

LAMPIRAN

TABEL 3.2.3
EVALUASI HASIL TERHADAP RENJA PERANGKAT DAERAH LINGKUP PROVINSI
DINAS KOPERASI DAN UKM PROVINSI LAMPUNG
PERIODE PELAKSANAAN JANUARI-DESEMBER TAHUN 2022

Kode Rekening	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Outcome)	Target RENSTRA Provinsi pada Tahun 2024 (Akhir Periode RENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA Provinsi sampai dengan tahun2021		Target Kinerja dari Anggaran Renja Provinsi Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan Tahun 2022								Tingkat Capaian Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian RENSTRA s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		III		IV		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
									K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.								
2	KOPERASI DAN UKM			73,041,577,133		16,513,384,872		19,873,627,134		1,774,618,197		4,378,381,142		6,028,121,082		6,983,115,407		96.43		35,677,620,700		48.85	Dinas Koperasi dan UKM Prov. Lampung	
2.17	DINAS KOPERASI DAN UKM			73,041,577,133		16,513,384,872		19,873,627,134		1,774,618,197		4,378,381,142		6,028,121,082		6,983,115,407		96.43		35,677,620,700		48.85	Dinas Koperasi dan UKM Prov. Lampung	
2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Terpenuhinya Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Di OPD		51,041,145,133		11,216,331,772		12,751,297,334		1,455,733,372		3,530,822,792		3,149,453,432		4,122,621,215		96.14		23,474,962,583		45.99	Dinas Koperasi dan UKM Prov. Lampung	
2.17.01.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Keselarasan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		810,760,800		193,480,800		81,358,000		13,719,500		3,300,000		14,619,500		44,957,600		94.15		270,077,400		33.31	Dinas Koperasi dan UKM Prov. Lampung	
2.17.01.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	48	620,060,000	13	177,260,000	12	54,800,000	6	10,419,500	1	-	3	11,319,500	2	28,299,600	100.00	91.31	25	227,298,600	52.08	36.66	Dinas Koperasi dan UKM Prov. Lampung	
2.17.01.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	44	190,700,800	11	16,220,800	11	26,558,000	3	3,300,000	3	3,300,000	3	3,300,000	2	16,658,000	100.00	100.00	22	42,778,800	50.00	22.43	Dinas Koperasi dan UKM Prov. Lampung	
2.17.01.02	Administrasi Keuangan Daerah	Persentase Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		43,040,617,541		9,515,367,392		9,772,046,242		1,265,353,427		3,258,054,607		2,680,796,509		2,403,284,667		98.32		19,122,856,602		44.43	Dinas Koperasi dan UKM Prov. Lampung	
2.17.01.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	300	42,800,617,541	75	9,485,367,392	73	9,722,046,242	19	1,254,803,427	19	3,248,054,607	19	2,657,021,509	16	2,397,609,667	100.00	98.31	148	19,042,856,602	49.33	44.49	Dinas Koperasi dan UKM Prov. Lampung	
2.17.01.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	108	40,000,000	-	-	36	10,000,000	9	2,300,000	9	2,200,000	9	4,075,000	9	1,425,000	100.00	100.00	36	10,000,000	33.33	25.00	Dinas Koperasi dan UKM Prov. Lampung	
2.17.01.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3	40,000,000	-	-	1	10,000,000	0	3,000,000	0	3,300,000	0	3,700,000	0	-	100.00	100.00	1	10,000,000	33.33	25.00	Dinas Koperasi dan UKM Prov. Lampung	
2.17.01.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	68	160,000,000	17	30,000,000	17	30,000,000	4	5,250,000	5	4,500,000	5	16,000,000	3	4,250,000	100.00	100.00	34	60,000,000	50.00	37.50	Dinas Koperasi dan UKM Prov. Lampung	
2.17.01.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		60,000,000		-		20,000,000		2,947,000		1,754,000		1,825,000		12,919,000		97.23		19,445,000		32.41	Dinas Koperasi dan UKM Prov. Lampung	
2.17.01.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	6	30,000,000	-	-	2	10,000,000	1	1,399,000	-	944,000	1	938,000	-	6,534,000	100.00	98.15	2	9,815,000	33.33	32.72	Dinas Koperasi dan UKM Prov. Lampung	
2.17.01.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	6	30,000,000	-	-	2	10,000,000	1	1,548,000	-	810,000	1	887,000	-	6,385,000	100.00	96.30	2	9,630,000	33.33	32.10	Dinas Koperasi dan UKM Prov. Lampung	
2.17.01.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah		2,248,150,592		483,525,315		702,378,457		35,084,799		96,928,200		152,775,000		416,187,302		99.80		1,184,500,616		52.69	Dinas Koperasi dan UKM Prov. Lampung	

Kode Rekening	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Outcome)	Target RENSTRA Provinsi pada Tahun 2024 (Akhir Periode RENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA Provinsi sampai dengan tahun2021		Target Kinerja dari Anggaran Renja Provinsi Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan Tahun 2022								Tingkat Capaian Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian RENSTRA s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		III		IV		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
									K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.								
2.17.01.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4	50,000,000	1	19,999,400	1	10,000,000	0	1,571,000	0	1,980,000	0	3,236,600	0	3,169,000	100.00	99.57	2	29,956,000	50.00	59.91	Dinas Koperasi dan UKM Prov. Lampung	
2.17.01.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	6	65,000,000	1	20,000,000	1	25,000,000	0	4,337,000	0	4,118,500	0	8,281,100	0	8,263,400	100.00	100.00	2	45,000,000	33.33	69.23	Dinas Koperasi dan UKM Prov. Lampung	
2.17.01.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4	60,417,892	1	17,296,800	1	13,936,457	0	2,130,000	0	2,310,000	0	4,394,000	0	5,102,400	100.00	100.00	2	31,233,200	50.00	51.70	Dinas Koperasi dan UKM Prov. Lampung	
2.17.01.06.07	Penyediaan Bahan Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	7	253,444,700	1	60,789,200	1	65,000,000	0	2,317,000	0	2,449,500	0	5,228,300	0	54,874,700	100.00	99.80	2	125,658,700	28.57	49.58	Dinas Koperasi dan UKM Prov. Lampung	
2.17.01.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	48	155,800,000	12	31,100,000	12	40,000,000	3	6,000,000	3	4,800,000	3	13,426,000	3	15,675,000	100.00	99.75	24	71,001,000	50.00	45.57	Dinas Koperasi dan UKM Prov. Lampung	
2.17.01.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	48	1,663,488,000	12	334,339,915	12	548,442,000	3	18,729,799	3	81,270,200	3	118,209,000	3	329,102,802	100.00	99.79	24	881,651,716	50.00	53.00	Dinas Koperasi dan UKM Prov. Lampung	
2.17.01.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		3,217,647,400		628,445,121		1,691,847,000		108,303,246		97,080,085		183,619,028		1,141,936,711		90.49		2,159,384,191		67.11	Dinas Koperasi dan UKM Prov. Lampung	
2.17.01.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48	1,388,641,000	12	214,438,721	12	236,847,000	3	45,700,246	3	13,481,085	3	55,204,428	3	70,167,711	100.00	77.92	24	398,992,191	50.00	28.73	Dinas Koperasi dan UKM Prov. Lampung	
2.17.01.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	48	1,829,006,400	12	414,006,400	12	1,455,000,000	3	62,603,000	3	83,599,000	3	128,414,600	3	1,071,769,000	100.00	92.54	24	1,760,392,000	50.00	96.25	Dinas Koperasi dan UKM Prov. Lampung	
2.17.01.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		1,663,968,800		395,513,144		483,667,635		30,325,400		73,705,900		115,818,395		103,335,935		66.82		718,698,774		43.19	Dinas Koperasi dan UKM Prov. Lampung	
2.17.01.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	4	279,390,000	1	61,988,400	1	95,000,000	0	4,305,600	0	17,002,400	0	17,466,195	0	3,190,000	100.00	44.17	2	103,952,595	50.00	37.21	Dinas Koperasi dan UKM Prov. Lampung	
2.17.01.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	36	1,177,078,800	9	306,024,744	9	309,000,000	3	24,729,800	1	30,481,500	3	71,180,200	2	75,760,935	100.00	65.42	18	508,177,179	50.00	43.17	Dinas Koperasi dan UKM Prov. Lampung	
2.17.01.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	86	57,500,000	50	27,500,000	12	29,667,635	3	1,290,000	3	1,550,000	3	2,425,000	3	24,385,000	100.00	99.94	62	57,150,000	72.09	99.39	Dinas Koperasi dan UKM Prov. Lampung	
2.17.01.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3	150,000,000	-	-	1	50,000,000	-	-	1	24,672,000	1	24,747,000	-	-	100.00	98.84	1	49,419,000	33.33	32.95	Dinas Koperasi dan UKM Prov. Lampung	
2.17.02	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Persentase Fasilitas Penerbitan Sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK) Untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		2,902,460,000		746,500,000		511,500,000		28,278,000		29,541,000		167,701,000		279,923,000		98.82		1,251,943,000		43.13	Dinas Koperasi dan UKM Prov. Lampung	
2.17.02.01	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Persentase Koperasi Yang Diberi Fasilitas Pengurusan Izin Usaha Simpan Pinjam		1,369,157,000		331,925,000		245,697,000		20,508,000		14,001,000		167,701,000		43,430,000		99.98		577,565,000		42.18	Dinas Koperasi dan UKM Prov. Lampung	

Kode Rekening	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Outcome)	Target RENSTRA Provinsi pada Tahun 2024 (Akhir Periode RENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA Provinsi sampai dengan tahun2021		Target Kinerja dari Anggaran Renja Provinsi Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan Tahun 2022								Tingkat Capaian Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian RENSTRA s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		III		IV		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
									K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.								
2.17.02.01.01	Facilitasi Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1(Satu) Daerah Provinsi yang Memiliki Usaha Simpan Pinjam	15	1,369,157,000	9	331,925,000	11	245,697,000	9	20,508,000	-	14,001,000	1	167,701,000	1	43,430,000	100.00	99.98	20	577,565,000	133.33	42.18	Dinas Koperasi dan UKM Prov. Lampung	
2.17.02.02	Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Persentase Koperasi Yang Difasilitasi Izin Pembentukan dan atau Pembukaan Cabang/Kantor Koperasinya		1,533,303,000		414,575,000		265,803,000	25	7,770,000	25	15,540,000	25	-	25	236,493,000		97.74	100	674,378,000		43.98	Dinas Koperasi dan UKM Prov. Lampung	
2.17.02.02.01	Facilitasi Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	18	1,533,303,000	11	414,575,000	14	265,803,000	11	7,770,000	1	15,540,000	1	-	1	236,493,000	100.00	97.74	25	674,378,000	138.89	43.98	Dinas Koperasi dan UKM Prov. Lampung	
2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Pemeriksaan dan Pengawasan Yang Dilakukan Untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		775,599,000		90,395,000		150,000,000		27,917,000		30,815,400		66,181,200		24,974,800		99.93		240,283,400		30.98	Dinas Koperasi dan UKM Prov. Lampung	
2.17.03.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Persentase Koperasi Yang Diawasi Kelembagaan Dan Diperiksa Yang Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan		775,599,000		90,395,000		150,000,000		27,917,000		30,815,400		66,181,200		24,974,800		99.93		240,283,400		30.98	Dinas Koperasi dan UKM Prov. Lampung	
2.17.03.01.01	Meningkatkan Akuntabilitas Kepercayaan Kepatuhan Kesenambungan dan Memberikan Manfaat yang Sebesar-Besarnya ke pada Anggota dan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Akuntabilitas, Kepercayaan, Kepatuhan, Kesenambungan, dan Pemberian Manfaat ke pada Anggota KUKM dan Masyarakat	4	387,081,000	1	44,175,000	1	75,000,000	-	-	-	-	1	66,181,200	-	8,807,800	100.00	99.99	2	119,164,000	50.00	30.79	Dinas Koperasi dan UKM Prov. Lampung	
2.17.03.01.02	Peningkatan Kepatuhan Koperasi Terhadap Peraturan Perundang-Undangan dan Terbentuknya Koperasi yang Kuat Sehat Mandiri, Tangguh, serta Akuntabel	Jumlah Koperasi Yang Memenuhi Peraturan Perundang-Undangan dan Tersedianya Koperasi yang Kuat, Sehat, Mandiri, Tangguh, serta Akuntabel	120	388,518,000	35	46,220,000	30	75,000,000	10	27,917,000	20	30,815,400	-	-	-	16,167,000	100.00	99.87	65	121,119,400	54.17	31.17	Dinas Koperasi dan UKM Prov. Lampung	
2.17.04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi Yang Dinilai Sehatnya Untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		533,039,000		61,789,000		100,000,000		-		18,062,000		48,743,900		33,140,670		99.95		161,735,570		30.34	Dinas Koperasi dan UKM Prov. Lampung	

Kode Rekening	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Outcome)	Target RENSTRA Provinsi pada Tahun 2024 (Akhir Periode RENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA Provinsi sampai dengan tahun2021		Target Kinerja dari Anggaran Renja Provinsi Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan Tahun 2022								Tingkat Capaian Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian RENSTRA s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket		
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		III		IV		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.				
									K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.										
2.17.04.01	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Persentase KSP/USP Yang Dinilai Sehatannya		533,039,000		61,789,000		100,000,000			-		18,062,000		48,743,900		33,140,670			99.95		161,735,570		30.34	Dinas Koperasi dan UKM Prov. Lampung	
2.17.04.01.01	Mengukur Tingkat Kesehatan Koperasi	Jumlah Koperasi Hasil Pengukuran Tingkat Kesehatan	120	533,039,000	40	61,789,000	30	100,000,000	-	-	13	18,062,000	14	48,743,900	-	33,140,670	90.00	99.95	67	161,735,570	55.83	30.34	Dinas Koperasi dan UKM Prov. Lampung			
2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase SDM Koperasi Yang Mengikuti Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		10,491,660,000		2,550,689,500		2,885,489,800		18,456,825		525,300,600		1,087,335,300		1,235,585,425			99.35		5,417,367,650		51.63	Dinas Koperasi dan UKM Prov. Lampung		
2.17.05.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Persentase SDM Koperasi Yang Meningkatkan Kompetensi dan Pengetahuannya		10,491,660,000		2,550,689,500		2,885,489,800		18,456,825		525,300,600		1,087,335,300		1,235,585,425			99.35		5,417,367,650		51.63	Dinas Koperasi dan UKM Prov. Lampung		
2.17.05.01.01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	3,222	10,491,660,000	766	2,550,689,500	####	2,885,489,800	104	18,456,825	155	525,300,600	420	1,087,335,300	470	1,235,585,425	100.00	99.35	1915	5,417,367,650	59.44	51.63	Dinas Koperasi dan UKM Prov. Lampung			
2.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase Koperasi Yang Diberikan Dukungan Fasilitas Pendampingan dan Perlindungan Usaha Untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		1,519,336,000		392,359,800		647,840,000		126,400,000		71,945,200		314,994,800		125,831,000			98.66		1,031,530,800		67.89	Dinas Koperasi dan UKM Prov. Lampung		
2.17.06.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Persentase Koperasi Yang Mendapat Fasilitas Pengembangan dan Perlindungan Usaha		1,519,336,000		392,359,800		647,840,000		126,400,000		71,945,200		314,994,800		125,831,000			98.66		1,031,530,800		67.89	Dinas Koperasi dan UKM Prov. Lampung		
2.17.06.01.01	Peningkatan Produktivitas Nilai Tambah Akses Pasar Akses Pembiayaan Penguatan Kelembagaan Penataan Manajemen Standarisasi dan Restrukturisasi Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	230	1,519,336,000	40	392,359,800	30	647,840,000	5	126,400,000	10	71,945,200	10	314,994,800	5	125,831,000	100.00	98.66	70	1,031,530,800	30.43	67.89	Dinas Koperasi dan UKM Prov. Lampung			
2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH USAHA KECIL DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Rasio Pertumbuhan Wirausaha Baru Yang Berskala Kecil		4,212,835,000		1,063,516,800		2,422,840,000		99,633,000		105,683,600		1,022,176,400		1,020,181,897			92.77		3,311,191,697		78.60	Dinas Koperasi dan UKM Prov. Lampung		
2.17.07.01	Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan Kemitraan Kemudahan Perijinan Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	Persentase UMKM dan Wirausaha Pemula Yang Difasilitasi Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan		4,212,835,000		1,063,516,800		2,422,840,000		99,633,000		105,683,600		1,022,176,400		1,020,181,897			92.77		3,311,191,697		78.60	Dinas Koperasi dan UKM Prov. Lampung		

Kode Rekening	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Outcome)	Target RENSTRA Provinsi pada Tahun 2024 (Akhir Periode RENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA Provinsi sampai dengan tahun2021		Target Kinerja dari Anggaran Renja Provinsi Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan Tahun 2022								Tingkat Capaian Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian RENSTRA s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		III		IV		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
									K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.								
2.17.07.01.01	Menumbuhkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	400	4,212,835,000	105	1,063,516,800	100	2,422,840,000	25	99,633,000	25	105,683,600	25	1,022,176,400	25	1,020,181,897	100.00	92.77	205	3,311,191,697	51.25	78.60	Dinas Koperasi dan UKM Prov. Lampung	
2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase Usaha Kecil Yang diberikan Pendampingan Kelembagaan dan Usaha		1,565,503,000		391,803,000		404,660,000		18,200,000		66,210,550		171,535,050		140,857,400	98.06			788,606,000		50.37	Dinas Koperasi dan UKM Prov. Lampung	
2.17.08.01	Pengembangan Usaha Kecil Dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah	Persentase Usaha Kecil Yang Difasilitasi Pengembangan Usaha Dari Sisi Permodalan, Produksi dan Pemasaran serta Jaringan Usahanya		1,565,503,000		391,803,000		404,660,000		18,200,000		66,210,550		171,535,050		140,857,400	98.06			788,606,000		50.37	Dinas Koperasi dan UKM Prov. Lampung	
2.17.08.01.01	Produksi dan Pengolahan Pemasaran Sumber Daya Manusia serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	400	1,565,503,000	240	391,803,000	45	404,660,000	-	18,200,000	-	66,210,550	45	171,535,050	-	140,857,400	100.00	98.06	285	788,606,000	71.25	50.37	Dinas Koperasi dan UKM Prov. Lampung	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA %																99.66	96.43			53.33	48.85			
PREDIKAT KINERJA																Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Rendah	Rendah			
Monitoring Faktor																								
Faktor Pendorong keberhasilan kinerja												Penyelesaian DPA yang tepat waktu												
Faktor penghambat pencapaian kinerja												Dalam penetapan satuan target antara dokumen yang ada belum akurat dan penyediaan dana pelaksanaan kegiatan yang kurang lancar												
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya												Dioptimalkan penyediaan dana yang lebih lancar dan penyesuaian target dan sasaran kegiatan												
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPd berikutnya												Merencanakan dan melaksanakan rencana kerja yang telah disiapkan												

BANDAR LAMPUNG, JANUARI 2023



KEPALA DINAS KOPERASI DAN UKM
PROVINSI LAMPUNG,
Drs. SAMSURIAL, MM.
 PEMBINA UTAMA MADYA
 NIP. 19670418 199203 1 003